

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

**DINAS
KETAHANAN PANGAN**

**RENCANA KERJA (RENJA)
PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021**



LIWA, 2021

KATA PENGANTAR

Dalam rangka implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat tahun 2017-2022 dan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat 2017-2022, disusun Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021 untuk memberikan arahan yang memudahkan pencapaian target sasaran secara terukur.

Renja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dimana masing-masing OPD diberi amanat untuk menyusun Rencana Kinerja yang merupakan bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Renja SKPD ini menggambarkan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 dan telah diselaraskan dengan program Pusat, Provinsi dan Kabupaten serta memperhatikan masukan-masukan dari para pemangku kepentingan Bidang Ketahanan Pangan.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renja ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu diperlukan masukan dan saran yang bersifat membangun dalam rangka penyusunan Renja OPD selanjutnya. Atas dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak diucapkan terimakasih.

Liwa, Juni 2021
Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Lampung Barat

Dto

RUSPAN ANWAR,SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19661220 199303 1 007

DAFTAR ISI

HALAMAN

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan tujuan	3
1.4 Sitematika Penulisan.....	4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	5
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	6
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	16
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	18
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	31

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	32
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	32
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD	32
3.3 Program dan kegiatan	34

BAB IV PENUTUP	37
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

Lampiran I	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2020
Lampiran II	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022

BAB.I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa urusan pangan menjadi urusan wajib non pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan pangan sehingga dapat hidup sehat aktif dan produktif.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 salah satunya memprioritaskan peningkatan ketahanan pangan sebagai salah satu sub agenda prioritas untuk mewujudkan agenda pembangunan daerah yakni dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi lokal. Dalam rangka meningkatkan dan memperkuat ketahanan pangan tersebut, maka kebijakan pembangunan diarahkan pada: (1) pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok; (2) stabilisasi harga pangan; (3) perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat; (4) mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan; dan (5) peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan.

Kabupaten Lampung Barat memiliki potensi sumberdaya alam yang sangat beranekaragam. Potensi sumberdaya alam tersebut sangat menunjang pembangunan ekonomi, termasuk sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor yang dominan di Lampung Barat yang merupakan faktor utama penggerak ekonomi masyarakat terutama dalam rangka mencukupi kebutuhan termasuk pangan.

Potensi sumber daya alam tersebut dapat diptimalkan sejalan dengan kebijakan Kementerian Pertanian dalam rangka pemantapan ketahanan pangan, dimana akan fokus pada peningkatan produksi pangan pokok strategis yaitu padi, jagung, kedelai, gula (tebu) dan daging sapi-kerbau serta komoditas pertanian lainnya, untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri. Selain itu keterjangkauan pangan dengan upaya peningkatan

stabilitas harga pangan dan meratanya distribusi pangan serta percepatan penganekaagaman konsumsi pangan juga merupakan hal yang harus segera diwujudkan. Pemantapan ketahanan pangan tersebut, harus berlandaskan kemandirian dan kedaulatan pangan yang didukung oleh subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan yang terintegrasi.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Dinas Ketahanan Pangan berperan secara aktif untuk mengkoordinasikan, mensinkronkan dan mendorong seluruh pemangku kepentingan baik secara horizontal maupun vertikal dalam mewujudkan ketahanan pangan sampai tingkat perseorangan dengan berlandaskan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan secara berkesinambungan. Perwujudan ketahanan pangan tersebut ditandai dengan tiga hal pokok yang harus diperhatikan, yaitu: (i) ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal; (ii) keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat, dan (iii) pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan dan gizi

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2021 disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan yang mengacu pada Renstra tahun 2017-2022, untuk mewujudkan pemantapan ketahanan pangan yang tercermin dari tertanganinya desa rawan pangan, stabilnya harga dan pasokan pangan pokok, dan meningkatnya keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat. Renstra tersebut akan dijabarkan dalam rencana kegiatan tahunan dengan memperhatikan evaluasi tahunan dan perkembangan kebijakan serta kebutuhan masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021 berlandaskan pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. UU Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan. Undang-undang ini menjelaskan tentang konsep ketahanan pangan, komponen dan pihak-pihak yang harus berperan dalam mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan.

5. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
7. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi merupakan penjabaran yang lebih merinci pengaturan baik aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan sesuai amanat UU No.18/2012. Dengan demikian, upaya pemantapan Ketahanan Pangan yang berlandaskan Kedaulatan Pangan dan Kemandirian Pangan dapat diwujudkan.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
9. Peraturan Menteri Pertanian No. 15/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Pedoman Desa Mandiri Pangan
10. Peraturan Menteri Pertanian No. 16/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Pedoman Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat
11. Peraturan Menteri Pertanian No. 17/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Pedoman Pengembangan Lumbung Pangan
12. Peraturan Menteri Pertanian No. 18/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Pedoman Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sebagai bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 – 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat adalah dalam rangka menyusun rencana teknis kegiatan tahunan yang menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja yang diemban oleh seluruh aparatur, yang dilaksanakan secara koordinatif dan terpadu dengan instansi terkait, lembaga swadaya masyarakat, kalangan dunia usaha, dan masyarakat, agar terwujud keberhasilan pelaksanaannya secara sinergi yang akan dibiayai oleh Dana APBD Kabupaten, APBD Propinsi, dan APBN.
2. Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) ini adalah:
 - a. Menetapkan program dan kegiatan sebagai Rencana Aksi (*Action Plan*) dalam rangka mencapai Visi, Misi, tujuan dan Sasaran yang akan dicapai dalam Rencana Strategis (Renstra);
 - b. Mengakomodir masalah-masalah prioritas dalam pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan Kabupaten Lampung Barat yang perlu diselesaikan, terutama yang mengarah pada pemulihan atau perbaikan, peningkatan pelayanan dan pembinaan terhadap masyarakat dalam hal peningkatan kinerja pada aspek ketersediaan, distribusi, sereta konsumsi dan kemanana pangan..
 - c. Mengidentifikasi sumber pembiayaan dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan;
 - d. Untuk memberikan pedoman bagi aparatur dan unit kerja di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat dalam melaksanakan pelayanan administrasi sebagai fungsi utamanya, dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat ;

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renca Kerja Perubahan ini adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Semestr II Tahun 2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 tahun 2010 Bab III mengenai pengukuran kinerja di dalam pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa setiap akhir periode instansi melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam penetapan kinerja, dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran indikator kinerja sasaran. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK).

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Target Tahun 2021	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	Meningkatnya penanganan daerah rawan pangan	Jumlah desa yang bebas dari status rawan pangan	1	0	- 0 % - Didasarkan hasil dari analisa Peta rawan pangan kabupaten
2	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat	Ketersedian Energi (Kkal/kap/hr	4.000 kkal/kap/hr	0 %	- 0 % - Perhitungan ini didasarkan atas hasil analisa NBM th 2021 yang masih dalam tahapan input data
		Ketersedian Protein (Kkal/kap/hr	92 gram/kap/hr	0 %	- 0 % - Perhitungan ini didasarkan atas hasil analisa NBM th 2021 yang masih dalam tahapan input data
3	Meningkatnya Keamanan Pangan	Tingkat Keamanan Pangan Segar	> 80 %	0 %	- 0 % - Masih dalam tahapan uji residu di LAB Fak Pertanian UNILA

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2021 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan jumlah program 5 program dan jumlah kegiatan termasuk rutin sebanyak 14 kegiatan. Dan 37 Sub Kegiatan Alokasi dana Tahun 2021 Untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 4.782.130.500 (Belanja Pegawai Rp.2.333.785.400, Belanja Barang dan Jasa Rp.2.448.345.100) terrealisasi sebesar Rp.1.574.886.063,- (Belanja Pegawai Rp.861.875.459, Belanja Barang dan Jasa Rp713.010.604) atau sebesar 32.17 %

Berikut Capain Kinerja sub kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021 sampai dengan triwulan II :

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Ket
02	02	09		URUSAN PEMERINTAH YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR PANGAN				
				TUJUAN				
				Meningkatnya ketahanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	91.10 Point	50%	
				SASARAN STRATEGIS				
				Meningkatnya penanganan daerah rawan pangan	Penurunan wilayah rawan pangan	1 Pekon	50%	
				Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat	Tingkat Ketersediaan energi	4.000 kkal/kap/hr	50%	
					Tingkat Ketersediaan protein	92 gram/kap/hr	50%	
				Meningkatnya Keamanan Pangan	Tingkat Keamanan Pangan Segar	>80 %	100%	
02	09	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Tepat Waktu	100%	80%	

02	09	01	1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	12 Dokumen	80%	
				02.09.01.1.0. 01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Reviu Renstra	1 Dokumen	100%	Tercapai
					Jumlah Dokumen Renja yang disusun	2 Dokumen	100%	Tercapai
				02.09.01.1.0. 02. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	100%	Tercapai
				02.09.01.1.0. 03. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD	1 Dokumen	100%	Tercapai
				02.09.01.1.0. 04. Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	0%	Masih dalam Tahapan KUAPPAS
				02.09.01.1.0. 05. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD	1 Dokumen	0%	Dalam Tahapan RKA Perubahan
				02.09.01.1.0. 06. Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja ikhtisar SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	2 Dokumen	100%	Tercapai
				02.09.01.1.0. 07. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	6 Dokumen	100%	Tercapai
02	09	01	1.02	Administrasi Keuangan	Jumlah Administrasi Keuangan Yang disusun	100%	50%	
				02.09.01.1.02.01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang terbayar gaji dan tunjangannya	22 ASN	100%	tercapai
				02.09.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah PPPK yang Terbayar Gajinya dan Jumlah Bulan Pengelolaan keuangan	12 Bulan	50%	Sampai TW II
				02.09.01.1.02.05.koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Akhir Tahun	1 Dokumen	0%	Disusun pada akhir Tahun Anggaran
				02.09.01.1.02.07.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Semesteran yang disusun	2 Dokumen	50%	Laporan Sem I
				02.09.01.1.02.08. Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	50%	Laporan Sem I

02	09	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pelatihan dan Penigkatan Disiplin Kkapasitas sumber daya Aparatur	4 Orang	0%	Di Refokusing
				02.09.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	4 Orang	0%	Di Refokusing
02	09	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu	100%	75%	
				02.09.01.1.06.01. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik	12 Jenis	100%	tercapai
				02.09.01.1.06.04. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor	20 Jenis	100%	tercapai
				02.09.01.1.06.05. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis cetakan	7 Jenis	100%	tercapai
					Jumlah jenis penggandaan	6 Jenis	100%	tercapai
				02.09.01.1.06.06. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah SKHU	12 SKHU	50%	Dalam tahapan pelaksanaan
					Jumlah publikasi di surat kabar	1 SKHU	0%	Dalam tahapan pelaksanaan
				02.09.01.1.06.08. Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan makan minum tamu	12 Bulan	50%	Dalam tahapan pelaksanaan
				02.09.01.1.06.09. Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyediaan makan minum rapat	12 Bulan	50%	Dalam tahapan pelaksanaan
					Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan pembinaan dalam daerah	12 Bulan	50%	Dalam tahapan pelaksanaan
Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi luar daerah	12 Bulan	50%	Dalam tahapan pelaksanaan					
02	09	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Kantor	100%	50%	Dalam tahapan pelaksanaan
				02.09.01.1.08.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk	500 Surat	50%	Dalam tahapan pelaksanaan
					Jumlah surat keluar	350 Surat	50%	Dalam tahapan pelaksanaan
				02.09.01.1.08.02. Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	Jumlah rekening telpon	2 Rekening	100%	tercapai

02	09	01	1.09		Jumlah rekening listrik	4 Rekening	100%	tercapai				
				02.09.01.1.08.04. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah tenaga kebersihan	1 Orang	100%	tercapai				
					Jumlah jenis alat kebersihan	20 Jenis	100%	tercapai				
				Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100%	75%	Dalam tahapan pelaksanaan				
				02.09.01.1.09.01. Penyediaan jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas Jabatan	Jumlah motor yang dibayar pajaknya	17 Unit	60%	Dalam tahapan pelaksanaan				
					Jumlah minibus yang dibayar pajaknya	2 Unit	0%	Dalam tahapan pelaksanaan				
					Jumlah minibus yang dirawat	2 Unit	100%	tercapai				
					Jumlah motor yang dirawat	17 Unit	100%	tercapai				
				02.09.01.1.09.06. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Genset yang dirawat	1 Unit	100%	tercapai				
					Jumlah Komputer yang dirawat	4 Unit	100%	tercapai				
					Jumlah Printer yang dirawat	6 Unit	100%	tercapai				
				02	09	02		PENGLOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Jumlah sumberdaya ekonomi pangan terhadap wilayah	11 Kelompok LPM dan 1 Kawasan Mandiri Pangan	55%	Dalam tahapan pelaksanaan
				02	09	02	2	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kelompok sumberdaya ekonomi pangan	11 Kelompok	55%	Dalam tahapan pelaksanaan
								2.9.02.2.01.01 Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Tersalurkannya bantuan gabah pengisian LPM	5 Kelompok	100%	tercapai
					Jumlah pembinaan lumbung pangan masyarakat	20 kelompok	50%	Dalam tahapan pelaksanaan				
					Jumlah Lumbung Pangan yang Dibangaun dari Dana DAK	1 kelompok LPM	20%	Dalam tahapan pelaksanaan				
				2.9.02.2.01.03. Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah kelompok afinitas kawasan mandiri pangan yang dibina	5 Kelompok	100%	tercapai				

					Jumlah pembinaan kawasan mandiri pangan	5 Lokasi	100%	tercapai
02	09	03		2 09 03.PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN MASYARAKAT PANGAN	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	89.1 Point	20%	Dalam tahapan pelaksanaan
02	09	03	2	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten / kota dalam rangka Satbilisasi Pasokan Harga Pangan	Koefisien Variasi harga Pangan Pokok (Beras) dan Perbandingan Harga Gabah Ditingkat Petani	CV ≤ 10%	100%	tercapai
				2.9.03.2.01.01. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Dokumen Neraca Bahan Makanan dan Analisa Harga Pangan	1 Dokumen	50%	Dalam tahapan pelaksanaan
				2.9.03.2.01.04. Pemantauan Stok Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah dokumen hasil pemantauan mobilitas pangan di titik pantau/pos perbatasan	1 Dokumen	50%	Dalam tahapan pelaksanaan
				2.9.03.2.01.05. Pengembangan Kelembagaan dan Jaring distribusi Pangan	Jumlah Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) yang dibina	3 Gapoktan	100%	tercapai
				2.9.03.2.01.06. Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah toko tani yang dikembangkan (pelatihan manajemen, bantuan peralatan, penyediaan tempat usaha, sarana prasarana)	1 Unit	100%	tercapai
					Jumlah Gapoktan/LUPM yang dibina (pembinaan, bantuan pengemas, mesin sortir, timbangan, tester kadar air, gabah, mesin jahit karung, fasilitasi perizinan)	3 Kelompok	100%	tercapai
02	09	03	2	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah	100%	50%	Dalam tahapan pelaksanaan
				2.9.03.2.02.04. Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan cadangan Pangan Pemerintah 1 (satu) Tahun	1 Tahun	50%	Dalam tahapan pelaksanaan
					Pembuatan Perda Cadangan Pangan Pemerintah	0	0	refocusing

02	09	03	2	Pelaksanaan Pencapaian Tingkat konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Angka Kecukupan Gizi	Konsumsi Energi	2.150 (kkal/kap/hr)	35%	Dalam tahapan pelaksanaan
					Konsumsi Protein	57 (gram/kap/hr)	35%	Dalam tahapan pelaksanaan
				2.9.03.2.04.02. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber daya Lokal	Jumlah penyelenggaraan Lomba Cipta Menu Tingkat Provinsi	1 Kali	0%	Dalam tahapan pelaksanaan
					Jumlah Kelompok yang melaksanakan dak nonfisik P2L	7 Kelompok	0%	Dalam tahapan pelaksanaan
					Pemeliharaan Opal Kantor Dinas Ketahanan Pangan kabupaten Lampung Barat	1 Unit	100%	tercapai
					Pemeliharaan Opal PKK	1 Unit	100%	tercapai
					Jumlah Kelompok P2KP Yang dibina	47 Kelompok	50%	
					Jumlah Peserta Pelatihan Produk Turunan Kopi	30 Orang	100%	tercapai
					Jumlah pekon yang melaksanakan optimalisasi pekarangan	15 Pekon	100%	tercapai
					2.09.03.2.04.03. Koordinasi dan Singkronisasi Pemantauan dan evaluasi Konsumsi Pangan perkapita per tahun	Jumlah Dokumen Analisa Konsumsi Pangan	1 Dokumen	30%
02	09	04		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah desa/pekon yang bebas dari status rawan pangan	1 Pekon	50%	Dalam tahapan pelaksanaan
02	09	04	2	Penyusunan Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan Kecamatan	Jumlah dokumen/peta ketahanan pangan	1 Dokumen	50%	Dalam tahapan pelaksanaan
				2.9.04.2.01.01. Pemutakhiran dan analisa ketahanan dan Kerentanan pangan	Jumlah Dokumen Analisa Kerentanan dan Kerawanan Pangan	1 Dokumen	50%	Dalam tahapan pelaksanaan
02	09	04	2	Penangan Kerawan Pangan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Pekon Yang Turun Status Kerawanan Pangan dari Prioritas 1	1 Pekon	50%	Dalam tahapan pelaksanaan
				2.9.04.2.02.01. Koordinasi dan Singkronisasi Kerawanan Pangab Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen SKPG	1 Dokumen	50%	Dalam tahapan pelaksanaan
02	09	05		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Jenis produk pangan segar yang dilakukan pengawasan	1 Jenis	100%	tercapai

02	09	05	2	Pelaksanaan Pengawasan Pangan Segar Daerah Kabupaten / Kota	Jenis produk pangan segar yang dilakukan pengawasan	1 Jenis	100%	tercapai
				2.09.05.2.01.01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah yang dilakukan sosialisasi keamanan pangan	10 Sekolah	100%	tercapai
					Jumlah lokasi sosialisasi keamanan pangan	5 Lokasi	100%	tercapai
				2.09.05.2.01.05 Penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel pangan segar yang dilakukan uji	15 sample	100%	tercapai
					Jumlah pengadaan rapid test	4 Paket	100%	tercapai

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara Umum, pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan sampai dengan semester II telah dapat dilaksanakan, demikian juga sasaran yang ditetapkan telah tercapai dengan hasil cukup baik, capaian kinerja yang relatif tinggi menunjukkan telah terlaksananya kegiatan dengan baik dan sesuai dengan yang direncanakan/ ditargetkan. Tetapi penetapan target capaian kinerja untuk tahun mendatang masih perlu adanya peningkatan.

Aspek Ketersediaan Pangan

Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari 3 sumber, yaitu: 1) produksi dalam negeri; 2) pemasokan pangan; 3) pengelolaan cadangan pangan. Ketersediaan pangan dapat diamati pada berbagai tingkatan mencakup rumah tangga, regional (kab/kota, provinsi) dan nasional. Penyediaan pangan yang sesuai dengan kebutuhan gizi penduduk, baik jumlah maupun mutunya merupakan harapan setiap upaya pemenuhan kebutuhan pangan.

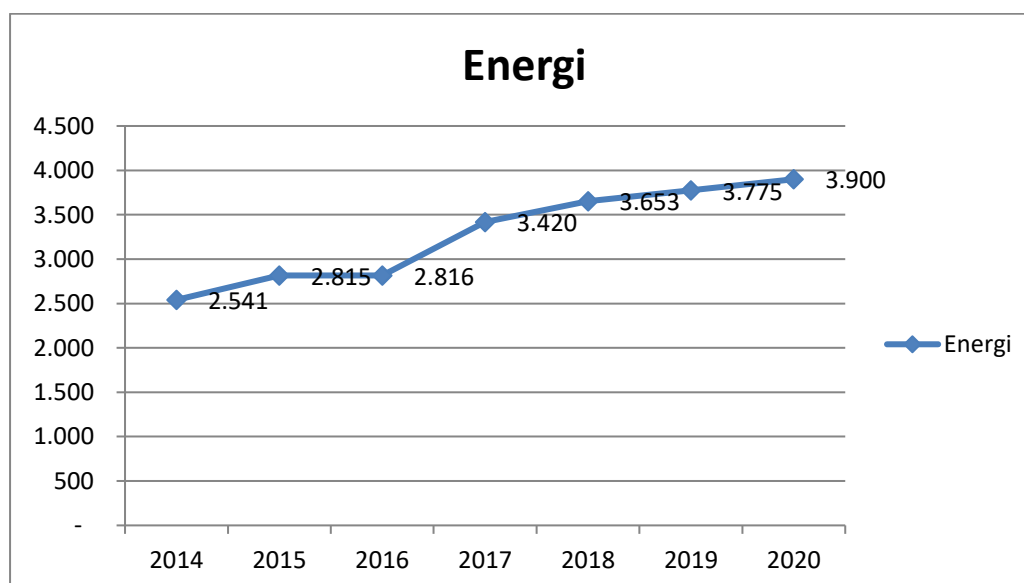
Situasi ketersediaan energi total untuk dikonsumsi oleh penduduk Lampung Barat pada tahun 2020 sebesar 3.900 kkal/kap/hr sedangkan ketersediaan proteinnya mencapai 90 gr/kap/hr dan capaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 91,6. Ketersediaan pangan baik sumber energi maupun protein di Kabupaten Lampung Barat telah melampaui standar yang dipersyaratkan dalam WNPG XI sebesar 2,400 kkal/kap/hr untuk ketersediaan energi dan 63 gr/kap/hr untuk ketersediaan protein.

Ketersediaan energi dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Perkembangan ketersediaan energi, protein dan skor PPH ketersediaan disajikan pada tabel berikut :

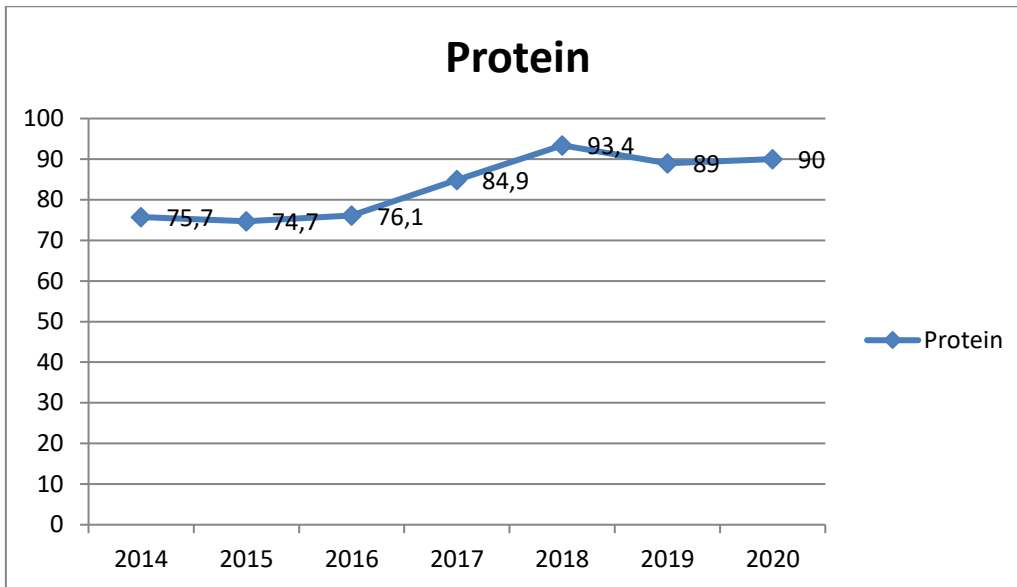
Tabel Perkembangan Tingkat Capaian Ketersediaan Energi, Protein dan Skor PPH Ketersediaan Tahun 2014-2020

Tahun	Energi (Kalori/Hari)	Protein (Gram/Hari)	Skor PPH Ketersediaan
2014	2.541	75,7	72,0
2015	2.815	74,7	80,5
2016	2.816	76,1	80,5
2017	3.420	84,9	87,5
2018	3.643	93,4	89,9
2019	3.775	88,	90,29
2020	3.900	90	91.6
Rata-rata	3.272	82,9	87,1

Trend perkembangan ketersediaan energi, protein dan skor PPH Ketersediaan dapat digambarkan pada grafik berikut :

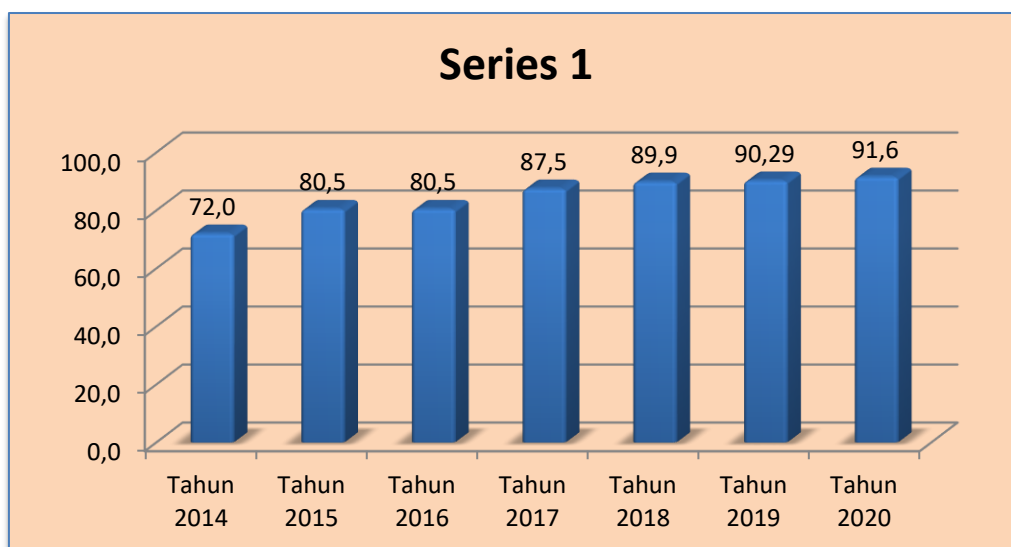


Gambar Perkembangan Ketersediaan Energi Penduduk Lampung Barat Tahun 2014-2019 (Kkal/kapita/hari)



Gambar Ketersediaan Protein Penduduk Lampung Barat Tahun 2014-2020(gr/kapita/hari)

Tingkat ketersediaan pangan selain dilihat dari kecukupan gizinya, baik energi dan protein, juga dinilai dari sisi keberagaman ketersediaan gizi berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH). PPH tingkat ketersediaan dihitung berdasarkan ketersediaan energi Neraca Bahan Makanan (NBM). Keberagaman ketersediaan pangan akan mendukung pencapaian keberagaman konsumsi pangan sehingga dapat dicapai sasaran konsumsi pangan yang diharapkan. Perkembangan skor PPH tingkat ketersediaan berdasarkan Neraca Bahan Makanan tahun 2014 – 2020 menunjukkan skor rata-rata 87,1 persen. Skor PPH tingkat ketersediaan dari NBM tahun 2020 adalah 91,6. Perkembangan pencapaian Skor Pola Pangan Harapan tahun 2014 – 2020 dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar . Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Tahun 2014-2020

Aspek Distribusi dan Akses Pangan

Distribusi dan akses pangan merupakan jembatan penghubung antara aspek ketersediaan pangan dan konsumsi pangan. Peran Distribusi pangan sangat strategis, apabila tidak dapat terselenggara secara baik dan lancar, bahan pangan yang dibutuhkan masyarakat tidak akan terpenuhi. Begitu juga dengan akses masyarakat terhadap pangan baik akses fisik maupun ekonomi merupakan hal yang penting mendapat perhatian sehingga seluruh masyarakat dapat dipastikan dapat menjangkau pangan untuk kelangsungan hidupnya.

Selain itu untuk memastikan bahwa pangan dapat dijangkau oleh masyarakat maka pemerintah memantau kondisi stabilitas harga terutama terhadap pangan strategis dengan menghitung koefisien variasi harga. Koefisien variasi (CV) harga adalah perbandingan antara simpangan standar dengan nilai rata-rata harga yang dinyatakan dengan persentase. Koefisien variasi berguna untuk melihat sebaran data harga dari harga rata-ratanya. Semakin kecil nilai koefisien variasi maka menunjukkan harga semakin stabil atau dengan kata lain tidak terjadi gejolak harga. Harga dinyatakan terjadi gejolak jika Koefisien Variasi diatas 10%.

Pada tahun 2020 harga beras kualitas medium rata-rata sebesar Rp.10.279/Kg, harga tertinggi Rp.11.588/Kg dan terendah Rp.9.761/Kg. Secara umum koefisien variasi (CV) harga beras antar waktu sangat stabil, ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan stabilisasi harga pangan pokok cukup berhasil dengan CV = 2.0%. Perkembangan harga beras periode Januari - Desember 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Perkembangan harga beras tahun 2020

No	Bulan	Harga Beras Rata-Rata (Rp.)
1	Januari	11.588
2	Februari	11.463
3	Maret	10.763
4	April	9.868
5	Mei	9.761
6	Juni	9.811
7	Juli	9.821
8	Agustus	9.929
9	September	9.912
10	Oktober	10.011
11	November	10.140
12	Desember	10.281
	Rata-rata	10.279
	Koefisien Variasi (CV)	2.0 %

Perkembangan harga gabah ditingkat petani perlu dimonitor setiap saat mengingat komoditas tersebut sangat strategis bagi masyarakat Indonesia khususnya di Kabupaten Lampung Barat karena merupakan komoditas utama sebagai makanan pokok mayoritas masyarakat Lampung Barat. Selain itu, gabah merupakan komoditas pangan yang paling banyak dibudidayakan oleh mayoritas petani. Terganggunya kondisi ketersediaan, pasokan dan harga gabah dapat mempengaruhi berbagai aspek, baik ekonomi, politik, maupun ketahanan.

Pemerintah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap komoditas gabah, antara lain melalui penentuan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah ditingkat petani. Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Kebijakan Perberasan. Kebijakan perberasan sangat efektif dalam mengendalikan stabilitas harga di tingkat petani, baik gabah ataupun beras.

Harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani pada tahun 2020 berkisar antara Rp.5.250 kg s.d Rp.5.350/kg dengan harga rata-rata sebesar Rp.4.779/kg. Perubahan harga GKP di tingkat petani relatif kecil, dan cenderung stabil.

Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah Kering Panen (GKP) tahun 2020 telah ditetapkan sebesar Rp.5.200 berdasarkan Permentan 03/2017 dengan kadar air 25-30%. Jika dibandingkan dengan ketentuan HPP tersebut maka harga aktual di Lampung Barat telah berada di atas HPP.

Aspek Konsumsi Pangan

Pemenuhan konsumsi pangan masyarakat meliputi kuantitas dan kualitas konsumsi pangan atau keanekaragaman konsumsi pangan dengan gizi berimbang. Proporsi energi dari setiap kelompok pangan terhadap total anjuran konsumsi energi memberikan gambaran kualitas atau keragaman dan keseimbangan gizi, yang ditunjukkan dengan skor pola pangan harapan (PPH). Konsumsi pangan yang ideal digambarkan dengan skor PPH 100. Perkembangan pencapaian skor PPH konsumsi disajikan pada tabel berikut :

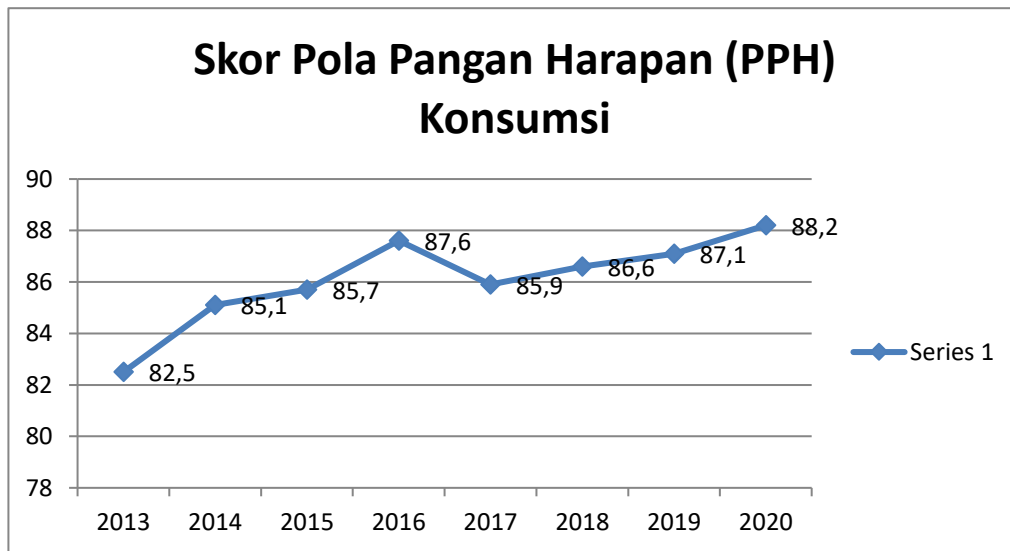
Tabel Perkembangan pencapaian skor PPH konsumsi Tahun 2013-2020

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	82,5	85,1	85,7	87,6	85,9	86,6	87,1	88.2

Berdasarkan tabel, kualitas konsumsi pangan yang ditunjukkan dengan skor PPH, tahun 2012 - 2020 terjadi peningkatan pada tahun 2020 dari 88,2 pada tahun 2019 menjadi 87,1.

Perkembangan pencapaian skor PPH Konsumsi digambarkan dalam grafik berikut :

Gambar Grafik perkembangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Kabupaten Lampung Barat tahun 2013-2020



Berdasarkan hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi X tahun 2012 merekomendasikan pencapaian target skor PPH sebesar 95 menjadi target capaian tahun 2025.

Gambaran pemenuhan kuantitas konsumsi pangan diketahui dari tingkat konsumsi energi dan protein, yaitu proporsi konsumsi energi atau protein aktual terhadap Angka Kecukupan Gizi/AKG (rekomendasi Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi/WNPG XI Tahun 2014, yaitu Angka Kecukupan Energi/AKE 2.150 kkal/kapita/hari, dan Angka Kecukupan Protein/AKP sebesar 57 gram/kapita/hari).

Dari hasil analisa pola konsumsi pangan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020 menunjukkan bahwa konsumsi pangan penduduk per kapita per hari di tingkat rumah tangga dilihat dari masing-masing kelompok pangan masih didominasi oleh kelompok pangan padi-padian dalam pemenuhan kebutuhan energi yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Konsumsi Energi Setiap Kelompok Pangan Tahun 2020

No	Kelompok pangan	Kecukupan energi WNPG (Kkal/kap/hr)	Capaian 2020 (Kkal/kap/hr)	Skor AKE	Skor Maks	GAP AKE dan Skor Maksimal
1	Padi-padian	1075	1123,9	25,0	25,0	0,0
2	Umbi-umbian	129	115,1	2,2	2,5	-0,3
3	Pangan Hewani	258	149,9	13,9	24,0	-10,1
4	Minyak dan Lemak	215	437,6	10,1	5,0	5,1
5	Buah/Biji Berminyak	64,5	26,8	0,4	1,0	-0,9
6	Kacang-kacangan	107,5	89,0	8,3	10,0	-2,7
7	Gula	107,5	60,9	1,4	2,5	-1,1
8	Sayur dan Buah	129	128,2	29,8	30,0	-0,2
9	Lain-lain	64,5	15,5	0,0	0,0	0,0
Jumlah		2150	2.157			

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk mencapai konsumsi energi yang ideal perlu diimbangi dengan peningkatan konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah. Meskipun tren konsumsi umbi-umbian mengalami peningkatan, namun konsumsi beras masih mendominasi kontribusi energi dari pangan sumber karbohidrat. Hal ini menyebabkan jumlah agregat kebutuhan konsumsi beras masyarakat masih tinggi. Kondisi ini menunjukkan konsumsi energi penduduk masih belum memenuhi kaidah gizi seimbang yang dianjurkan.

Untuk itu, di masa mendatang pola konsumsi pangan masyarakat diarahkan pada pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA). Upaya pemerintah dalam rangka penurunan konsumsi beras melalui peningkatan konsumsi pangan sumber karbohidrat lain seperti umbi-umbian masih mengalami hambatan, antara lain :

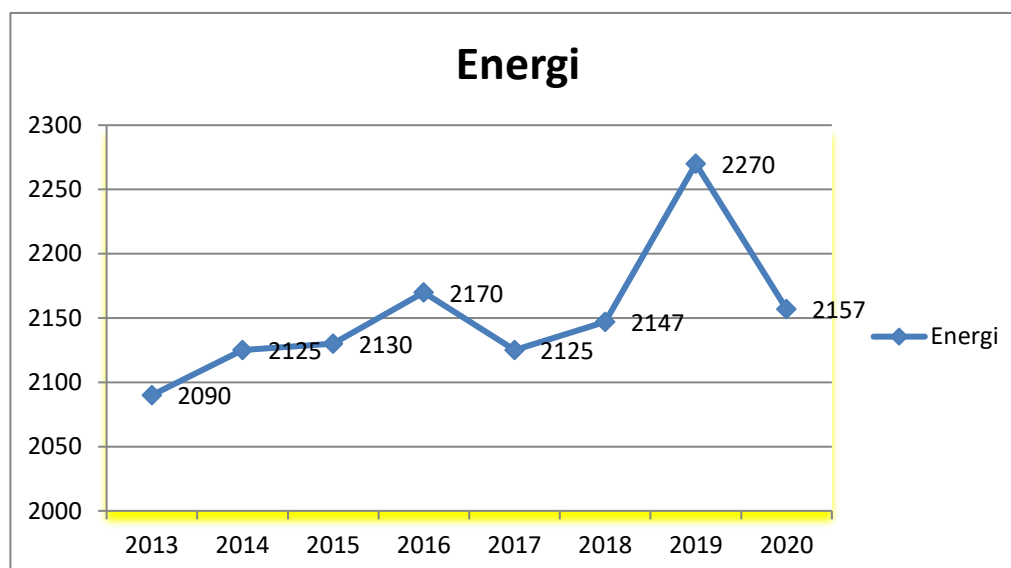
- (a) Produksi umbi-umbian masih belum stabil, sehingga mempengaruhi harga umbi-umbian yang cukup mahal;
- (b) Teknologi pengolahan pangan lokal/umbi-umbian (seperti tepung-tepungan, berasan/butiran dan lain-lain) belum memasuki tahap industrialisasi masyarakat belum mampu mengaksessnya;

- (c) Teknologi penyimpanan pangan lokal/umbi-umbian dalam jangka waktu yang panjang belum banyak dan belum tersosialisasikan ke masyarakat;
- (d) Berbagai produk olahan pangan lokal belum tersosialisasi dengan baik di masyarakat dan masih dianggap sebagai pangan inferior.

Perkembangan konsumsi energi masyarakat Kabupaten Lampung Barat tahun 2013-2020 disajikan pada tabel dan grafik berikut :

Tabel .Perkembangan Konsumsi Energi Tahun 2013-2020

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	20
Konsumsi energi (kkal/kap/hr)	2.090	2.125	2.130	2.170	2.125	2.147	2.270	2.157



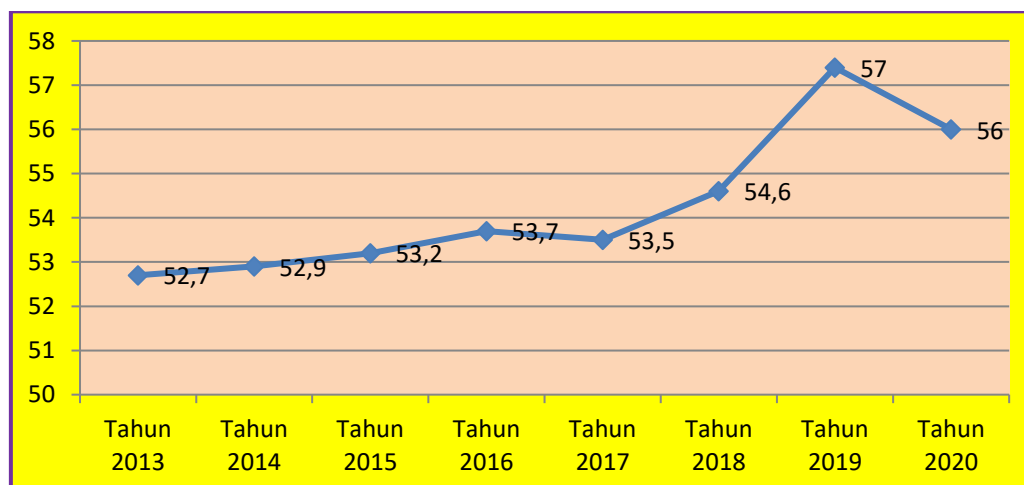
Gambar Perkembangan rata-rata konsumsi energi (kkal/kap/hr) Kabupaten Lampung Barat tahun 2014-2020

Konsumsi energi pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini disebabkan karena terjadinya penurunan konsumsi masyarakat pada post makan dan lemak serta biji-bijian dikarenakan menurunnya daya beli masyarakat akibat dampak pandemi covid 19

Konsumsi protein sebagian besar masih belum beragam sesuai dengan Pola Pangan Harapan, dan masih di dominansi oleh pangan hewani. Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian konsumsi pangan hewani, antara lain: pengaruh kondisi sosial-budaya, ekonomi dan ketersediaan pangan hewani. Keanekaragaman sosial ekonomi masyarakat menjadi peluang dan potensi untuk mengembangkan pangan yang beragam, dan keanekaragaman pola makan dipengaruhi oleh ketersediaan pangan disajikan pada tabel dan grafik berikut :

Tabel Perembangankonsumsi protein tahun 2013-2020

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Konsumsi protein (gram/kap/hr)	52,7	52,9	53,2	53,7	53,5	54,6	57,4	56,8



Gambar Perkembangan rata-rata konsumsi protein (graml/kap/hr) Kabupaten Lampung Barat tahun 2013-2020

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berbagai permasalahan pembangunan ketahanan pangan yang dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari perumusan isu strategis pembangunan ketahanan pangan. Perumusan dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan ketahanan pangan Kabupaten Lampung Barat yang merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat serta kemudahan untuk dikelola. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penanganan kerawanan pangan

Potensi kerawanan pangan di Lampung Barat masih cukup tinggi baik kerawanan kronik maupun transien yang diakibatkan kemiskinan, terbatasnya infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumber daya yang rendah dan seringnya terjadi bencana alam. Masih kurangnya kesiapan pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan atas terjadinya kerawanan pangan. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya cadangan pangan pemerintah daerah.

Penanganan kerawanan pangan dilakukan dengan memasukkan perbedaan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses kegiatan penanganan kerawanan pangan baik berupa kegiatan pemberdayaan untuk mengurangi potensi kerawanan pangan maupun kegiatan intervensi penanggulangan kerawanan pangan dan gizi.

2. Peningkatan stabilitas pasokan, harga dan distribusi pangan

Stabilitas pasokan dan harga merupakan indikator yang menunjukkan kinerja sistem distribusi. Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi untuk menghubungkan produsen dengan konsumen. Ketidاكلancaran proses distribusi akan mengakibatkan biaya pemasaran yang mahal dan kerusakan komoditas pertanian. Permasalahan yang terjadi pada proses distribusi karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana transportasi, kondisi geografis yang berbukit-bukit, letak administrasi penduduk yang berada di daerah yang sulit dijangkau, dan iklim tidak menentu yang dapat mengganggu transportasi bahan pangan. Permasalahan teknis dalam proses distribusi ini berakibat melonjaknya ongkos angkut. Waktu tempuh pengangkutan bahan pangan segar pada saat terjadi gangguan baik karena kondisi infrastruktur jalan yang tidak memadai, maupun cuaca yang tidak menentu akan mengakibatkan bahan pangan rusak semakin banyak sehingga akan mengakibatkan harga pangan cenderung naik yang mengakibatkan melambungnya tingkat inflasi. Selain itu panjangnya rantai pemasaran menyebabkan peningkatan nilai tambah yang seharusnya diterima oleh petani berkurang.

3. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat.

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masih rendah yang ditunjukkan dengan Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Kondisi tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan karena keterbatasan ekonomi, pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang masih terbatas, kecenderungan proporsi konsumsi pangan berbahan baku lokal dan berkembangnya globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis impor. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat dilaksanakan dengan tidak membedakan jenis kelamin dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat sesuai kondisi wilayahnya.

4. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Segar

Pada kondisi keamanan pangan yang beredar di masyarakat ditunjukkan dengan masih ditemukannya produk pangan yang tidak aman karena terpapar oleh cemaran secara biologi, fisik maupun penggunaan bahan kimia yang berlebihan maupun yang dilarang serta masih ditemukannya pangan kadaluarsa yang beredar di masyarakat. Selain itu maraknya kasus pangan hewani seperti flu burung dan antraks yang dapat mengakibatkan kematian. Belum berkembangnya sertifikasi produk pangan segar (sertifikasi Prima II dan Prima III) mengakibatkan rendahnya nilai tambah produk pangan segar. Produk pangan kurang dapat bersaing di pasar nasional dan jaminan mutu dan keamanan pangan belum dapat dipastikan.

Dari hasil pemantauan yang dilakukan, permasalahan yang menyertai penanganan keamanan pangan diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan produsen pangan dalam praktek penanganan pangan yang aman, belum optimalnya kontrol peredaran bahan berbahaya untuk pangan, belum efektifnya pengawasan keamanan pangan dan penerapan sanksi bagi pelanggar peraturan keamanan pangan secara tegas.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan salah satu pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah. Hasil review terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagai berikut :

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021

Kabupaten Lampung Barat

Nama Perangkat Daerah: Dinas Ketahanan Pangan

Kode	REVIU AWAL RKPD						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan / Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif								
02				URUSAN PEMERINTAH YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		lampung barat	91.10 Point	4,782,130,500	URUSAN PEMERINTAH YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR PANGAN		lampung barat	91.10 Point	4,896,216,900
02	09			PANGAN TUJUAN Meningkatnya ketahanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)				Meningkatnya ketahanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)			
				SASARAN STRATEGIS Meningkatnya penanganan daerah rawan pangan	Penurunan wilayah rawan pangan	Pekon Rawan Pangan Prioritas 1	1 Pekon	3,451,496,800	SASARAN STRATEGIS Meningkatnya penanganan daerah rawan pangan	Penurunan wilayah rawan pangan	Pekon Rawan Pangan Prioritas 1	1 Pekon	3,426,336,800
				Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat	Tingkat Ketersediaan energi	lampung barat	4.000 kkal/kap/hr	1,207,767,700	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat	Tingkat Ketersediaan energi	lampung barat	4.000 kkal/kap/hr	1,347,014,100

					Tingkat Ketersediaan protein	lampung barat	92 gram/kap/hr			Tingkat Ketersediaan protein	lampung barat	92 gram/kap/hr	
				Meningkatnya Keamanan Pangan	Tingkat Keamanan Pangan Segar	lampung barat	>80 %	122,866,000	Meningkatnya Keamanan Pangan	Tingkat Keamanan Pangan Segar	lampung barat	>80 %	122,866,000
02	09	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Tepat Waktu	balik bukit	100%	2,734,974,300	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Tepat Waktu	balik bukit	100%	2,709,814,300
02	09	01	1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	balik bukit	12 Dokumne	29,605,000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	balik bukit	12 Dokumne	29,605,000
				02.09.01.1.0. 01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Reviu Renstra	balik bukit	1 Dokumen	20,275,000	02.09.01.1.0. 01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Reviu Renstra	balik bukit	1 Dokumen	20,275,000
					Jumlah Dokumen Renja yang disusun	balik bukit	2 Dokumen			Jumlah Dokumen Renja yang disusun	balik bukit	2 Dokumen	
				02.09.01.1.0. 02. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	balik bukit	1 Dokumen	1,345,000	02.09.01.1.0. 02. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	balik bukit	1 Dokumen	1,345,000
				02.09.01.1.0. 03. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD	balik bukit	1 Dokumen	570,000	02.09.01.1.0. 03. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD	balik bukit	1 Dokumen	570,000

				02.09.01.1.0. 04. Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	balik bukit	1 Dokumen	870,000	02.09.01.1.0. 04. Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	balik bukit	1 Dokumen	870,000
				02.09.01.1.0. 05. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA –SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD	balik bukit	1 Dokumen	570,000	02.09.01.1.0. 05. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD	balik bukit	1 Dokumen	570,000
				02.09.01.1.0. 06. Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja ikhtisar SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD yang disusun	balik bukit	2 Dokumen	1,000,000	02.09.01.1.0. 06. Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja ikhtisar SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD yang disusun	balik bukit	2 Dokumen	1,000,000
				02.09.01.1.0. 07. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	balik bukit	6 Dokumen	4,975,000	02.09.01.1.0. 07. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	balik bukit	6 Dokumen	4,975,000
02	09	01	1.02	Administrasi Keuangan	Jumlah Administrasi Keuangan Yang disusun	balik bukit	100%	2,339,285,400	Administrasi Keuangan	Jumlah Administrasi Keuangan Yang disusun	balik bukit	100%	2,339,285,400
				02.09.01.1.02.01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang terbayar gaji dan tunjangannya	balik bukit	22 ASN	2,199,785,400	02.09.01.1.02.01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang terbayar gaji dan tunjangannya	balik bukit	22 ASN	2,199,785,400
				02.09.01 1.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah PPPK yang Terbayar Gajinya dan Jumlah Bulan Pengelolaan keuangan	balik bukit	12 Bulan	134,000,000	02.09.01 1.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah PPPK yang Terbayar Gajinya dan Jumlah Bulan Pengelolaan keuangan	balik bukit	12 Bulan	134,000,000
				02.09.01 1.02 05.koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Akhir Tahun	balik bukit	1 Dokumen	2,500,000	02.09.01 1.02 05.koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Akhir Tahun	balik bukit	1 Dokumen	2,500,000

				02.09.01.1.02.07.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Semesteran yang disusun	balik bukit	2 Dokumen	1,000,000	02.09.01.1.02.07.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Semesteran yang disusun	balik bukit	2 Dokumen	1,000,000
				02.09.01.1.02.08. Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah LaporanPrognosis Realisasi Anggaran	balik bukit	2 Dokumen	2,000,000	02.09.01.1.02.08. Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah LaporanPrognosis Realisasi Anggaran	balik bukit	2 Dokumen	2,000,000
02	09	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatura yang mengikuti Pelatihan dan Penigkatan Disiplin Kkapasitas sumber daya Aparatur	Luar lampung barat	4 Orang	10,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatura yang mengikuti Pelatihan dan Penigkatan Disiplin Kkapasitas sumber daya Aparatur			-
				02.09.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Luar lampung barat	4 Orang	10,000,000	02.09.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal			-
02	09	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu	balik bukit	100%	174,819,200	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu	balik bukit	100%	159,659,200
				02.09.01.1.06.01. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik	balik bukit	12Jenis	3,908,400	02.09.01.1.06.01. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik	balik bukit	12Jenis	3,908,400

				02.09.01.1.06.04. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor	balik bukit	20 Jenis	11,306,000	02.09.01.1.06.04. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor	balik bukit	20 Jenis	11,306,000
				02.09.01.1.06.05. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis cetakan	balik bukit	7 Jenis	32,949,800	02.09.01.1.06.05. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis cetakan	balik bukit	7 Jenis	32,949,800
					Jumlah jenis penggandaan	balik bukit	6 Jenis			Jumlah jenis penggandaan	balik bukit	6 Jenis	
				02.09.01.1.06.06. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah SKHU	balik bukit	12 SKHU	28,960,000	02.09.01.1.06.06. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah SKHU	balik bukit	12 SKHU	28,960,000
					Jumlah publikasi di surat kabar	balik bukit	1 SKHU			Jumlah publikasi di surat kabar	balik bukit	1 SKHU	
				02.09.01.1.06.08. Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan makan minum tamu	balik bukit	12 Bulan	3,205,000	02.09.01.1.06.08. Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan makan minum tamu	balik bukit	12 Bulan	3,205,000
				02.09.01.1.06.09. Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyediaan makan minum rapat	balik bukit	12 Bulan	94,490,000	02.09.01.1.06.09. Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyediaan makan minum rapat	balik bukit	12 Bulan	79,330,000
					Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan pembinaan dalam daerah	balik bukit	12 Bulan			Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan pembinaan dalam daerah	balik bukit	12 Bulan	
					Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi luar daerah	balik bukit	12 Bulan			Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi luar daerah	balik bukit	12 Bulan	
02	09	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang	balik bukit	100%	28,751,700	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang	balik bukit	100%	28,751,700

					Kantor				Daerah	Kantor			
				02.09.01.1.08.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk	balik bukit	500 Surat	4,380,000	02.09.01.1.08.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk	balik bukit	500 Surat	4,380,000
					Jumlah surat keluar	balik bukit	350 Surat			Jumlah surat keluar	balik bukit	350 Surat	
				02.09.01.1.08.02. Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	Jumlah rekening telpon	balik bukit	2 Rekening	17,280,000	02.09.01.1.08.02. Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	Jumlah rekening telpon	balik bukit	2 Rekening	17,280,000
					Jumlah rekening listrik	balik bukit	4 Rekening			Jumlah rekening listrik	balik bukit	4 Rekening	
				02.09.01.1.08.04. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah tenaga kebersihan	balik bukit	1 Orang	7,091,700	02.09.01.1.08.04. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah tenaga kebersihan	balik bukit	1 Orang	7,091,700
					Jumlah jenis alat kebersihan	balik bukit	20 Jenis			Jumlah jenis alat kebersihan	balik bukit	20 Jenis	
02	09	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	balik bukit	100%	152,513,000	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	balik bukit	100%	152,513,000
				02.09.01.1.09.01. Penyediaan jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas Jabatan	Jumlah motor yang dibayar pajaknya	balik bukit	17 Unit	146,515,000	02.09.01.1.09.01. Penyediaan jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas Jabatan	Jumlah motor yang dibayar pajaknya	balik bukit	17 Unit	146,515,000

					Jumlah minibus yang dibayar pajaknya	balik bukit	2 Unit			Jumlah minibus yang dibayar pajaknya	balik bukit	2 Unit		
					Jumlah minibus yang dirawat	balik bukit	2 Unit			Jumlah minibus yang dirawat	balik bukit	2 Unit		
					Jumlah motor yang dirawat	balik bukit	17 Unit			Jumlah motor yang dirawat	balik bukit	17 Unit		
				02.09.01.1.09.06. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Genset yang dirawat	balik bukit	1 Unit	5,998,000		02.09.01.1.09.06. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Genset yang dirawat	balik bukit	1 Unit	5,998,000
					Jumlah Komputer yang dirawat	balik bukit	4 Unit			Jumlah Komputer yang dirawat	balik bukit	4 Unit		
					Jumlah Printer yang dirawat	balik bukit	6 Unit			Jumlah Printer yang dirawat	balik bukit	6 Unit		
02	09	02		PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Jumlah sumberdaya ekonomi pangan terhadap wilayah	Kelompok LPM dan Kawasan Mandiri Pangan	11 Kelompok LPM dan 1 Kawasan Mandiri Pangan	656,522,500		PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Jumlah sumberdaya ekonomi pangan terhadap wilayah	Kelompok LPM dan Kawasan Mandiri Pangan	11 Kelompok LPM dan 1 Kawasan Mandiri Pangan	656,522,500
02	09	02	2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kelompok sumberdaya ekonomi pangan	Kelompok LPM Lampung Barat	11 Kelompok	656,522,500		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kelompok sumberdaya ekonomi pangan	Kelompok LPM Lampung Barat	11 Kelompok	656,522,500
				2.9.02.2.01.01 Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Tersalurkannya bantuan gabah pengisian LPM	Kelompok LPM Lampung Barat	5 Kelompok	622,522,500		2.9.02.2.01.01 Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Tersalurkannya bantuan gabah pengisian LPM	Kelompok LPM Lampung Barat	5 Kelompok	622,522,500

					Jumlah pembinaan lumbung pangan masyarakat	Kelompok LPM Lampung Barat	20 kelompok		Jumlah pembinaan lumbung pangan masyarakat	Kelompok LPM Lampung Barat	20 kelompok		
					Jumlah Lumbung Pangan yang Dibangaun dari Dana DAK	Kelompok LPM Lampung Barat	1 kelompok LPM		Jumlah Lumbung Pangan yang Dibangaun dari Dana DAK	Kelompok LPM Lampung Barat	1 kelompok LPM		
				2.9.02.2.01.03. Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah kelompok afinitas kawasan mandiri pangan yang dibina	Kawasan Mandiri Pangan di lampung barat	5 Kelompok	34,000,000	2.9.02.2.01.03. Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah kelompok afinitas kawasan mandiri pangan yang dibina	Kawasan Mandiri Pangan di lampung barat	5 Kelompok	34,000,000
					Jumlah pembinaan kawasan mandiri pangan	Kawasan Mandiri Pangan di lampung barat	5 Lokasi			Jumlah pembinaan kawasan mandiri pangan	Kawasan Mandiri Pangan di lampung barat	5 Lokasi	
02	09	03		2 09 03.PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Lampung Barat	89.1 Point	1,207,767,700	2 09 03.PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Lampung Barat	89.1 Point	1,347,014,100
02	09	03	2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten / kota dalam rangka Satbilisasi Pasokan Harga Pangan	Koefisien Variasi harga Pangan Pokok (Beras) dan Perbandingan Harga Gabah Ditingkat Petani	Lampung Barat	CV ≤ 10%	228,791,000	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten / kota dalam rangka Satbilisasi Pasokan Harga Pangan	Koefisien Variasi harga Pangan Pokok (Beras) dan Perbandingan Harga Gabah Ditingkat Petani	Lampung Barat	CV ≤ 10%	404,541,000
				2.9.03.2.01.01. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Dokumen Neraca Bahan Makanan dan Analisa Harga Pangan	Lampung Barat	1 Dokumen	69,560,000	2.9.03.2.01.01. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Dokumen Neraca Bahan Makanan dan Analisa Harga Pangan	Lampung Barat	1 Dokumen	69,560,000

				2.9.03.2.01.04. Pemantauan Stoc Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah dokumen hasil pemantauan mobilitas pangan di titik pantau/pos perbatasan	3 Titik Pantau	1 Dokumen	72,841,000	2.9.03.2.01.04. Pemantauan Stoc Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah dokumen hasil pemantauan mobilitas pangan di titik pantau/pos perbatasan	3 Titik Pantau	1 Dokumen	68,591,000
				2.9.03.2.01.05. Pengembang Kelembagaan dan Jaring distribusi Pangan	Jumlah Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) yang dibina	Kelompok LDPM	3 Gapoktan	51,945,000	2.9.03.2.01.05. Pengembang Kelembagaan dan Jaring distribusi Pangan	Jumlah Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) yang dibina	Kelompok LDPM	3 Gapoktan	51,945,000
				2.9.03.2.01.06. Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah toko tani yang dikembangkan (pelatihan manajemen, bantuan peralatan, penyediaan tempat usaha, sarana prasarana)	1 Kecamatan	1 Unit	34,445,000	2.9.03.2.01.06. Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah toko tani yang dikembangkan (pelatihan manajemen, bantuan peralatan, penyediaan tempat usaha, sarana prasarana)	5 Kecamatan	5 Unit	214,445,000
					Jumlah Gapoktan/LUPM yang dibina (pembinaan, bantuan pengemas, mesin sortir, timbangan, tester kadar air, gabah, mesin jahit karung, fasilitasi perizinan)	3 Kelompok LUPM	3 Kelompok			Jumlah Gapoktan/LUPM yang dibina (pembinaan, bantuan pengemas, mesin sortir, timbangan, tester kadar air, gabah, mesin jahit karung, fasilitasi perizinan)	3 Kelompok LUPM	3 Kelompok	
02	09	03	2	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah	Balik Bukit	100%	234,073,600	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah	Balik Bukit	100%	35,280,000

				2.9.03.2.02.04. Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan cadangan Pangan Pemerintah 1 (satu) Tahun	Balik Bukit	1 Tahun	234,073,600	2.9.03.2.02.04. Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan cadangan Pangan Pemerintah 1 (satu) Tahun	Balik Bukit	1 Tahun	35,280,000
					Pembuatan Perda Cadangan Pangan Pemerintah	Balik Bukit	0			Pembuatan Perda Cadangan Pangan Pemerintah		0	
02	09	03	2.04	Pelaksanaan Pencapaian Tingkat konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Angka Kecukupan Gizi	Konsumsi Energi	Lampung Barat	2.150 (kkal/kap/hr)	744,903,100	Pelaksanaan Pencapaian Tingkat konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Angka Kecukupan Gizi	Konsumsi Energi	Lampung Barat	2.150 (kkal/kap/hr)	907,193,100
					Konsumsi Protein	Lampung Barat	57 (gram/kap/hr)			Konsumsi Protein	Lampung Barat	57 (gram/kap/hr)	
				2.9.03.2.04.02. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber daya Lokal	Jumlah penyelenggaraan Lomba Cipta Menu Tingkat Provinsi	Balik Bukit dan Bandar Lampung	1 Kali	702,816,000	2.9.03.2.04.02. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber daya Lokal	Jumlah penyelenggaraan Lomba Cipta Menu Tingkat Provinsi		0 Kali	865,106,000
					Jumlah Kelompok yang melaksanakan dak nonfisik P2L	Krelompok KWT	7 Kelompok			Jumlah Kelompok yang melaksanakan dak nonfisik P2L	Krelompok KWT	7 Kelompok	
					Pemeliharaan Opal Kantor Dinas Ketahanan Pangan kabupaten Lampung Barat	DKP LB	1 Unit			Pemeliharaan Opal Kantor Dinas Ketahanan Pangan kabupaten Lampung Barat	DKP LB	1 Unit	
					Pemeliharaan Opal PKK	PKK Kabupaten	1 Unit			Pemeliharaan Opal PKK	PKK Kabupaten	1 Unit	
					Jumlah Kelompok P2KP Yang dibina	Kelompok P2kP	47 Kelompok			Jumlah Kelompok P2KP Yang dibina	Kelompok P2kP	47 Kelompok	

					Jumlah Peserta Pelatihan Produk Turunan Kopi	Peserta dari KWT yang memiliki produk pangan	30 Orang			Jumlah Peserta Pelatihan Produk Turunan Kopi	Peserta dari KWT yang memiliki produk pangan	30 Orang		
					Jumlah pekon yang melaksanakan optimalisasi pekarangan	5 Pekon	15 Pekon			Jumlah pekon yang melaksanakan optimalisasi pekarangan	15 Pekon	15 pekon		
				2.09.03.2.04.03. Koordinasi dan Singkronisasi Pemantaun dan evaluasi Konsumsi Pangan perkapita per tahun	Jumlah Dokumen Analisa Konsumsi Pangan	Lampung Barat	1 Dokumen	42,087,100	2.09.03.2.04.03. Koordinasi dan Singkronisasi Pemantaun dan evaluasi Konsumsi Pangan perkapita per tahun	Jumlah Dokumen Analisa Konsumsi Pangan	Lampung Barat	1 Dokumen	42,087,100	
02	09	04		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah desa/pekon yang bebas dari status rawan pangan	Pekon Rawan Pangan Prioritas 1 di lampung barat	1 Pekon	60,000,000	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah desa/pekon yang bebas dari status rawan pangan	Pekon Rawan Pangan Prioritas 1 di lampung barat	1 Pekon	60,000,000	
02	09	04	2	Penyusunan Peta dan Kerentanan Kerawanan Kecamatan Pangan	Jumlah dokumen/peta ketahanan pangan	Lampung Barat	1 Dokumen	30,000,000	Penyusunan Peta dan Kerentanan Kerawanan Kecamatan Pangan	Jumlah dokumen/peta ketahanan pangan	Lampung Barat	1 Dokumen	30,000,000	
				2.9.04.2.01.01. Pemutakhiran dan analisa ketahanan dan Kerentanan pangan	Jumlah Dokumen Analisa Kerentanan dan Kerawanan Pangan	Lampung Barat	1 Dokumen	30,000,000	2.9.04.2.01.01. Pemutakhiran dan analisa ketahanan dan Kerentanan pangan	Jumlah Dokumen Analisa Kerentanan dan Kerawanan Pangan	Lampung Barat	1 Dokumen	30,000,000	
02	09	04	2	Penangan Kerawan Pangan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Pekon Yang Turun Status Kerawanan Pangan dari Prioritas 1	Pekon Rawan Pangan Prioritas 1 di lampung barat	1 Pekon	30,000,000	Penangan Kerawan Pangan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Pekon Yang Turun Status Kerawanan Pangan dari Prioritas 1	Pekon Rawan Pangan Prioritas 1 di lampung barat	1 Pekon	30,000,000	

				2.9.04.2.02.01. Koordinasi dan Singkronisasi Kerawanan Pangan Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen SKPG	Lampung Barat	1 Dokumen	30,000,000	2.9.04.2.02.01. Koordinasi dan Singkronisasi Kerawanan Pangan Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen SKPG	Lampung Barat	1 Dokumen	30,000,000
02	09	05		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Jenis produk pangan segar yang dilakukan pengawasan	Lampung Barat	1 Jenis	122,866,000	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Jenis produk pangan segar yang dilakukan pengawasan	Lampung Barat	1 Jenis	122,866,000
02	09	05	2	Pelaksanaan Pengawasan Pangan Segar Daerah Kabupaten / Kota	Jenis produk pangan segar yang dilakukan pengawasan	Lampung Barat	1 Jenis	122,866,000	Pelaksanaan Pengawasan Pangan Segar Daerah Kabupaten / Kota	Jenis produk pangan segar yang dilakukan pengawasan	Lampung Barat	1 Jenis	122,866,000
				2.09.05.2.01.01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah yang dilakukan sosialisasi keamanan pangan	10 Sekolah	10 Sekolah	93,153,000	2.09.05.2.01.01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah yang dilakukan sosialisasi keamanan pangan	10 Sekolah	10 Sekolah	93,153,000
					Jumlah lokasi sosialisasi keamanan pangan	5 kecamatan	5 Lokasi			Jumlah lokasi sosialisasi keamanan pangan	5 kecamatan	5 Lokasi	
				2.09.05.2.01.05 Penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel pangan segar yang dilakukan uji	Unila	15 sample	29,713,000	2.09.05.2.01.05 Penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel pangan segar yang dilakukan uji	Unila	15 sample	29,713,000
					Jumlah pengadaan rapid test	Lampung Barat	4 Paket			Jumlah pengadaan rapid test	Lampung Barat	4 Paket	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan mengakomodir usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, LSM, KTNA, PKK, Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang pekon, kecamatan dan kabupaten/kota.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**A. Anggaran**

1. Jumlah anggaran Belanja pada RKPD/ Renja Murni tahun 2021 sebesar Rp. 4.783.130.500,-
2. Jumlah anggaran Belanja APBD murni tahun 2021 sebesar Rp. 2.448.345.100,-
3. Jumlah anggaran yang bertambah akibat refocusing tahun 2021 sebesar Rp. 342.290.000,-
4. Jumlah anggaran yang berkurang akibat refocusing tahun 2021 sebesar Rp. 228.203.600,-
5. Jumlah sub kegiatan yang ditunda pelaksanaannya akibat refocusing tahun 2021 sebanyak 1 kegiatan , dan jumlah sub kegiatan yang target kinerja ditunda akibat refocusing sebanyak 3 target kinerja pada (sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, Penyusunan Perda cadangan Pangan pada sub kegiatan pengelolaan cadangan pangan pemerintah serta Lomba Cipta menu pada sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber daya Lokal.
6. Jumlah subkegiatan yang baru muncul akibat refocusing anggaran tahun 2021 tidak ada , namun penambahan anggaran akibat refocusing sebesar Rp. 342.290.000,- mengakibatkan bertambahnya capaian kinerja pada sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang semula pengembangan Toko tani 1 Toko tani menjadi 5 toko tani yang dibantu pengembangannya berupa bantuan beras sebanyak @ 3.000 kg
 - b. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber daya Lokal yang semula target Jumlah pekon yang melaksanakan optimalisasi pekarangan sebanyak 5 pekon menjadi 15 pekon . dalam bentuk bantuan bibit untuk optimalisasi pekarangan

Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan pada urusan pemerintah bidang ketahanan pangan yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
2. Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirin Pangan
3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
4. Program Penanganan Kerawanan Pangan
5. Program Pengawasan Keamanan Pangan Segar

Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan pada masing-masing program pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 02.09.01.1.0. 01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 02.09.01.1.0. 02. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
- 02.09.01.1.0. 03. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
- 02.09.01.1.0. 04. Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD
- 02.09.01.1.0. 05. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA -SKPD
- 02.09.01.1.0. 06. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
- 02.09.01.1.0. 07. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

- 02.09.01.1.02.01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 02.09.01.1.02.02. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 02.09.01.1.02.05. koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
- 02.09.01.1.02.07. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / triwulanan/ Semesteran SKPD
- 02.09.01.1.02.08. Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 02.09.01.1.06.01. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 02.09.01.1.06.04. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 02.09.01.1.06.05. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 02.09.01.1.06.06. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 02.09.01.1.06.08. Fasilitas Kunjungan Tamu
- 02.09.01.1.06.09. Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD

d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 02.09.01.1.08.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 02.09.01.1.08.02. Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik
- 02.09.01.1.08.04. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

e. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 02.09.01.1.09.01. Penyediaan jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas Jabatan
- 02.09.01.1.09.11. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Pengelolaan Sumberdaya ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

a. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

- 2.9.02.2.01.01. Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
- 2.9.02.2.01.03. Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan

3. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

a. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten / kota dalam rangka Satbilisasi Pasokan Harga Pangan

2.9.03.2.01.01. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan

2.9.03.2.01.04. Pemantauan Stok Pasokan dan Harga Pangan

2.9.03.2.01.05. Pengembangan Kelembagaan dan Jaring distribusi Pangan

2.9.03.2.01.06. Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia

b. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota

2.9.03.2.02.04. Pemeliharaan / Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

c. Pelaksanaan Pencapaian Tingkat konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Angka Kecukupan Gizi

2.9.03.2.04.02. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber daya Lokal

2.09.03.2.04.03. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantaun dan evaluasi Konsumsi Pangan perkapita per tahun

4. Program Penanganan Kerawanan Pangan

a. Penyusunan Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan Kecamatan

2.9.04.2.01.01. Pemutakhiran dan analisa ketahanan dan Kerentanan pangan

b. Penangan Kerawan Pangan Kewenangan Kabupaten / Kota

2.9.04.2.02.01. Koordinasi dan Sinkronisasi Kerawanan Pangab Kabupaten Kota

5. Program Pengawasan Keamanan Pangan

a. Pelaksanaan Pengawasan Pangan Segar Daerah Kabupaten / Kota

2.09.05.2.01.01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

2.09.05.2.01.05 Penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021 merupakan bagian dari pelaksanaan Program unggulan Dinas Ketahanan Pangan, serta mengakomodir penyelesaian masalah-masalah prioritas dalam pelaksanaan pembangunan Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat, terutama yang mengarah pada pemulihan atau perbaikan, peningkatan pelayanan dan pembinaan terhadap masyarakat.

Keberhasilan pembangunan Ketahanan Pangan Lampung Barat tidak terlepas dari dukungan pendanaan, baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. Pendanaan tersebut merupakan stimulator (pengungkit) untuk tumbuhnya investasi swasta dan swadaya masyarakat yang bermuara pada pencapaian pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lampung Barat.

Agar Rencana Kerja yang telah disusun ini dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan Ketahanan Pangan di Kabupaten Lampung Barat, maka dalam implementasinya perlu komitmen, semangat, kemauan, dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran, dan keterbukaan tidak hanya oleh aparatur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat saja tetapi oleh segenap *stakeholder* baik pusat, provinsi maupun yang ada di Kabupaten Lampung Barat.